

**KISWORO DWI CAHYONO**

DIREKTUR EKSEKUTIF

WALHI KALIMANTAN SELATAN

**PERAN MASYARAKAT SIPIL DALAM MENDORONG  
PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI SDA DI KALIMANTAN SELATAN**

**#TolakUUMINERBA**  
**#BatalkanOmnibuslawCilaka**

**@CakKISS**

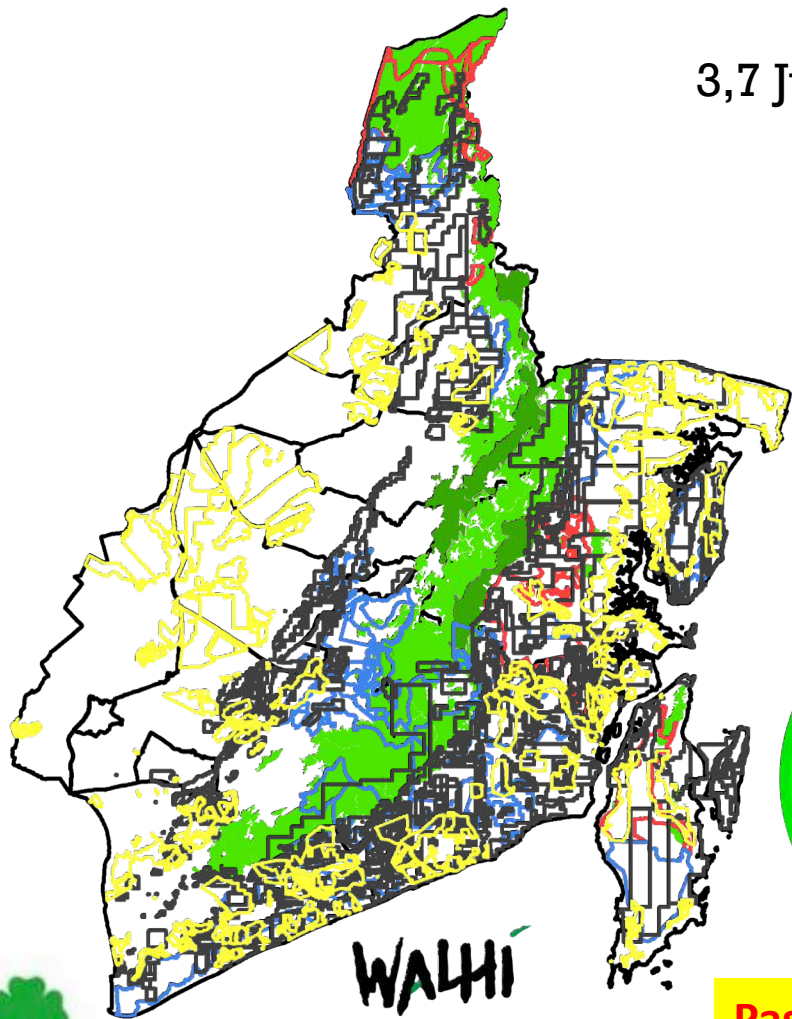
**WALHI**  
KALIMANTAN SELATAN

**#SaveMeratus**





# PENGUASAAN SUMBER DAYA ALAM DI KALIMANTAN SELATAN



**WALHI**  
KALIMANTAN SELATAN

3,7 Juta Hektar

## KALIMANTAN SELATAN

581.188 Hektar HUTAN SEKUNDER

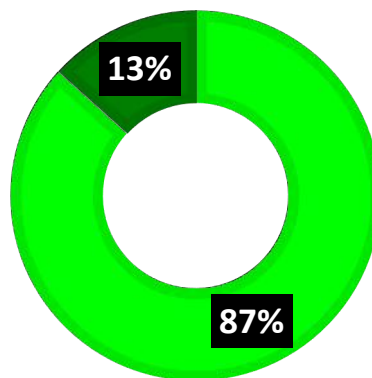
89.169 Hektar HUTAN PRIMER

234.492,77 Hektar IUPHHK-HA

567.865,51 Hektar IUPHHK-HT

1.219.461,21 Hektar IZIN TAMBANG

620.081,90 Hektar SAWIT



■ Hutan Sekunder

■ Hutan Primer

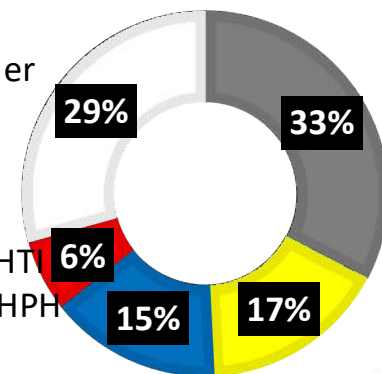
■ Izin Tambang

■ HGU

■ IUPHHK-HT / HT

■ IUPHHK-HA / HPH

■ Sisanya



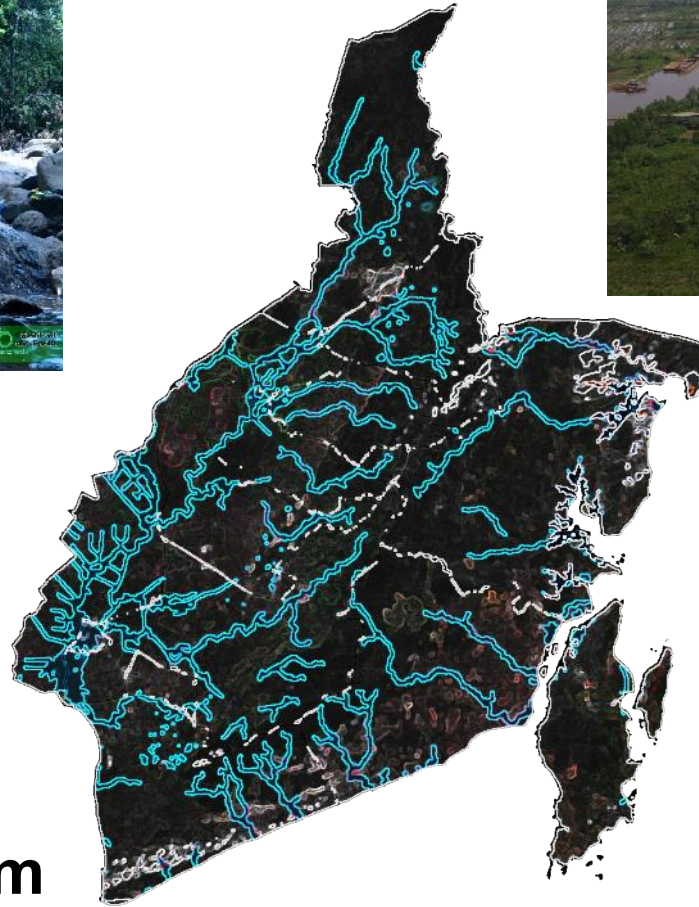
**Pasca Pencabutan C&C : Luas Izin Tambang 16 %**

**KALSEL DARURAT RUANG DAN DARURAT BENCANA EKOLOGIS**

**Beberapa dampak yang masih muncul antara lain :**

- 1. Banjir,**
- 2. Karhutla, ISPA 30.000 an (2019),**
- 3. Konflik Agraria (Hilangnya Desa dan Ruang Hidup Rakyat),**
- 4. Pencemaran ; Sungai Barito, Sungai Amandit, Sungai Balangan, Sungai Satui, dll**
- 5. Kriminalisasi**
- 6. Sering mati lampu (Kegelapan dilumbang Energi)**
- 7. Meninggal dilubang tambang,**
- 8. Dll**

# Fakta Spasial Sungai di Kalsel



**WALHI**  
KALIMANTAN SELATAN

**32.717,00 km**

**Sungai besar dan kecil melintas di Kalsel**





# Kerusakan - Pencemaran Air – Sungai di Kalsel

Menjelang Idul Fitri, 1 hektar tanah longsor di Desa Kintap-Tanah laut, akibat lubang tambang dekat sungai

## WALHI KALSEL PERTANYAKAN KEMAMPUAN GUBERNUR

INJARBARU – Bencana ekologis yang masih sering terjadi di Kalsel akibat kegiatan pertambangan dan tak adanya penegakan hukum terhadap para pelaku membuat Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalsel mempertanyakan kemampuan Pemprov Kalsel dalam menjalankan kewenangan yang mereka miliki. Padahal sesuai dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemprov memiliki kewenangan cukup luas dan tegas dalam bidang perlintangan, kehutanan, dan lingkungan. "Harusnya, Gubernur Kalsel sebagai kepala daerah menunjukkan kemampuannya. Kemampuan itu indikatornya, ada dakan tegas Pemprov terhadap para pelaku kerusakan ekologis, terutama yang berhubungan dengan pertambangan," ujar Dirai Walhi Kalsel, Kresworo Dwi Cahyono, Sabtu (8/7) di Banjarbaru.



## LOKASI TANAH LONGSOR DI DESA KINTAP KABUPATEN TANAH LAUT

Area Tambang CV. Datra Katama Jaya

Keterangan

Tanah longsor

Lubang tambang batubara terendam air



<http://walhikalsel.or.id/?p=468>





<http://walhikalsel.or.id/lubang-pasca-tambang-destinasi-maut-warga-kalsel/>

Kasyful Anwar (40) warga Desa Pakutik, Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar  
Tenggelaam 12 Juni 2020 ditemukan 16 Juni 2020



## BUKAAN DAN LUBANG TAMBANG

PD Baramarta  
Desa Rantau Nangka - Desa Pakutik  
Kecamatan Sungai Pinang  
Kabupaten Banjar

Bukaan tambang 2009 (area 104 ha; perimeter 7225 m) - garis putih  
Genangan 2009 (area 5,25 ha; perimeter 1474 m; length 888 m) - garis kuning  
Genangan 2018 (area 20 ha; perimeter, 2243 m; length 963 m) - garis merah

Image: 2009/4/10

Google Earth

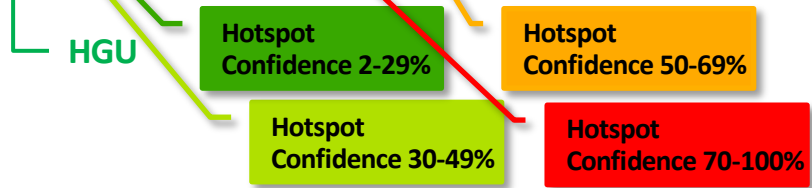
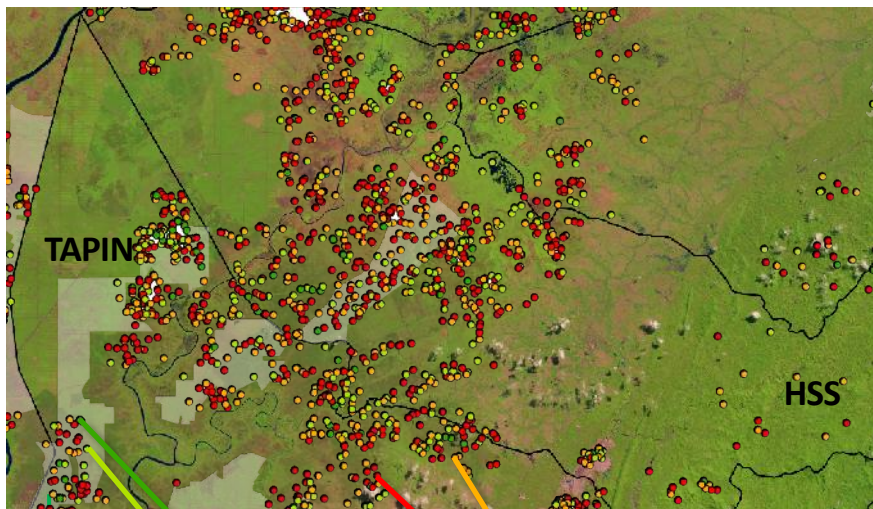
Image © 2020 Maxar Technologies

1 km

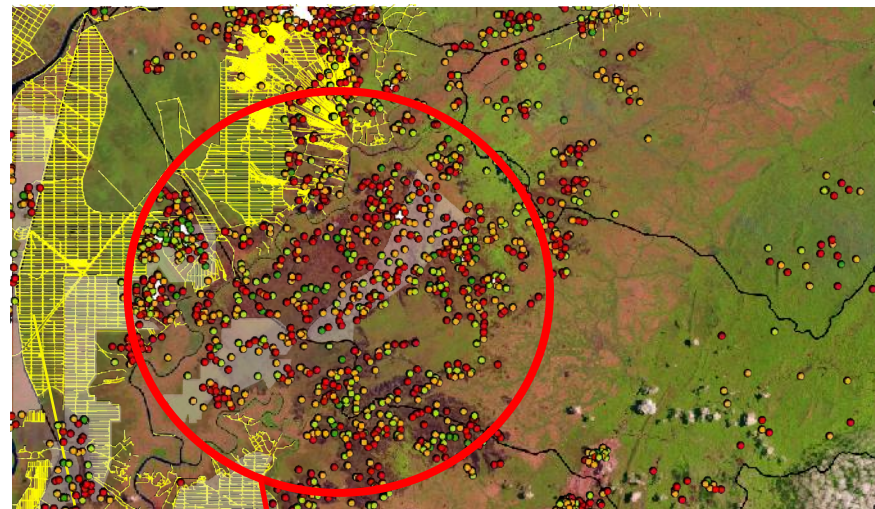
N



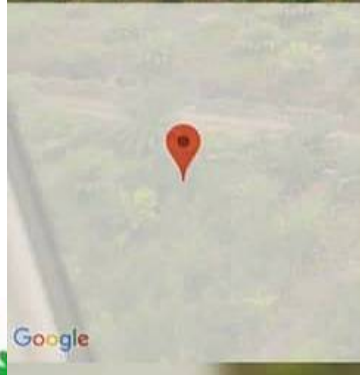
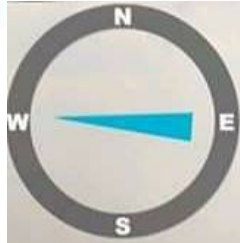
Juli 2019



September 2019



Walaupun perusahaan mengklaim bahwa tata kelola air dalam konsesi dilakukan dengan baik, terbukti bahwa pola hotspot dan Karhutla terjadi di sekitar konsesi bahkan di dalamnya. Artinya fungsi lindung ekosistem tidak terjaga, sebab jika salah satu penopang ekosistem seperti air rusak, maka dampak kerusakannya pun meluas. Dapat disimpulkan praktik buruk ekspansi monokultur sawit yang sistematis ini adalah penyumbang besar penyebab **bencana ekologi** dan **perubahan iklim** yang terjadi saat ini.



22 Sep 2019 14.45.52  
50M 250602 9652486  
Altitude:110.7m  
Speed:125.5km/h  
WalhiKalsel





22 Sep 2019 14.29.23  
50M 259162 9638741  
Altitude:94.8m  
Speed:169.3km/h  
CakKiSS



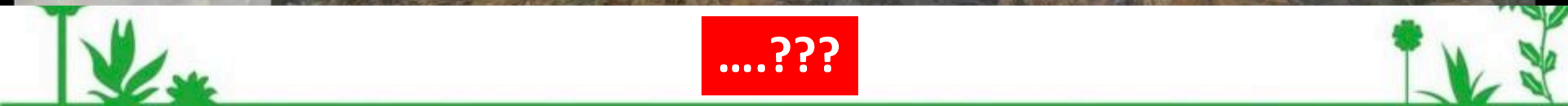


Google



22 Sep 2019 14.29.18  
50M 259306 9638555  
Altitude:94.3m  
Speed:162.6km/h  
CakKiSS

....???





**CONTOH PKP2B DI KALSEL**

Melalui SK Menteri ESDM no. 441.K/30/DJB/2017 yang ditandatangani oleh Dirjen Minerba. Pemerintah memberikan izin operasi produksi tambang batubara kepada PT. Mantimin Coal Mining (MCM) di Blok Batutangga (Hulu Sungai Tengah), dan Blok Upau (Tabalong & Balangan) seluas 5.908 hektar.

Di Hulu Sungai Tengah, izin seluas 1.955 hektar ini berada di kecamatan Batang Alai Timur. Parahnya lokasi izin MCM berada di atas Sungai Batang Alai. Sungai ini bagian hulunya berada di Pegunungan Meratus dan hilirnya berada di Kota Barabai. Di sungai ini juga terdapat bendungan Batang Alai.



Bendungan Batang Alai berada di hilir lokasi tambang MCM--hanya berjarak 2,9 kilometer. Bendungan ini mengairi daerah irigasi Batang Alai seluas 8.000 hektar yang dimanfaatkan untuk irigasi pertanian, perikanan, dan sumber air minum.







Area PKP2B PT. MCM di Hulu Sungai Tengah berada di sungai Batang Alai dan anak sungainya sepanjang 9,5 km, pemukiman desa Batutangga dan desa Nateh seluas 52 Ha, dan 1.544 Ha hutan sekunder, kebun campuran, dan ladang.



Hutan, ladang dan sungai adalah sumber kehidupan bagi masyarakat di dalam dan sekitarnya. Hutan berperan penting menahan dan menyediakan air bagi wilayah sekitarnya sampai ke tempat yang berada jauh di hilirnya. Jika sungai di bagian hulu rusak oleh tambang batubara, maka dampak itu akan dirasakan sampai ke hilir sungai.





**56%** Area PKP2B PT. Mantimin Coal Mining di HST berada di bentang alam karst



WALHI Berdiri 15 Oktober 1980 (39 Th),  
1 Nasional, 28 Daerah.

Anggota Walhi : Organisasi dan Individu  
International : Friends of The Earth (FoE) International

WALHI melaksanakan advokasi lingkungan hidup dan hak asasi manusia yang kegiatan dan strateginya meliputi:

- 1. Penyelamatan lingkungan hidup;**
- 2. Pengorganisasian rakyat;**
- 3. Pendidikan kritis;**
- 4. Kampanye dan riset;**
- 5. Litigasi;**
- 6. Menggalang aliansi kekuatan masyarakat sipil; dan**
- 7. Menggalang dukungan publik.**



# DOA DAN USAHA





## Ekosistem Rawa Gambut

- Pemanfaatan lahan gambut untuk budidaya pertanian pangan (Padi, Semangka, Gumbili Nagara, Kacang Nagara)
- Pemanfaatan tumbuhan rawa; Pembuatan Kerajinan tikar purun, tas, dll.
- Peternakan kerbau rawa di kecamatan Paminggir dan Danau Panggang
- Tempat mencari ikan dan budidaya perikanan (Kolam/Beje)





# Kearifan Lokal

Setiap proses berladang selalu diawali dan diakhiri dengan ritual “Aruh Adat”, sebagai media komunikasi dengan leluhur dan rasa syukur kepada “Yang Kuasa” atas hasil panen yang melimpah dan kesehatan yang diberikan. Aruh (Pesta Adat) dipimpin oleh “Balian” yang “bamamang” atau berbicara kepada leluhur dan “Yang Kuasa”.



Masyarakat Adat Dayak Meratus tidak menjual beras dari ladangnya, siapapun yang datang bisa memakannya. Beras disimpan di lumbung untuk kebutuhan sampai berladang tahun berikutnya, dan beberapa digunakan untuk Aruh. Makan dan menyimpan beras sendiri adalah wujud kedaulatan pangan bagi Masyarakat Adat Dayak Meratus

## Rekomendasi dan Desakan :

- Tolak dan Cabut UU Minerba
- Batalkan RUU Omnibuslaw
- Stop Ijin Baru
- Review Perijinan ; (Cabut Ijin-Ijin Tambang, HTI, HPH, Perkebunan Monokultur Skala Besar/Sawit)
- Akui Wilayah Kelola Rakyat (Pertanian, Nelayan, Ekosistem Rawa Gambut, Wilayah Adat Dayak Meratus)
- Pengembangan Ekonomi berbasiskan Potensi Lokal, Kearifan Lokal, Ramah Lingkungan dan Berkeadilan Lintas Generasi
- Bentuk Satgas atau Komisi Khusus Kejahatan Tambang, Kejahatan Lingkungan, Kejahatan SDA / Komisi Khusus Korupsi SDA
- Bentuk Pengadilan Lingkungan
- Buktikan Kita Serius Ber NEGARA (Untuk mewujudkan Wilayah/Lingkungan yang Baik dan Rakyat Sejahtera, Sehat, Cerdas dan Aman)
- Pilih Pemimpin dan Caleg yang berpihak pada keselamatan Rakyat dan Lingkungan.



# TERIMAKASIH



#SAVEKPK  
#BERSIHKANINDONESIA  
#PULIHKANINDONESIA